**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BURAU**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, serta penjabarannya melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timurmaka dapat dijabarkan uraian tugas dan fungsi **Camat** sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f) Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;

Selain tugas Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan
2. Membantu sekretaris daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan untuk bahan perumusan kebijakan Bupati
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas sektoral

 Selanjutnya **susunan organisasi** Kecamatan Burau terdiri dari :

1) **Camat;**

2) **Sekretaris;** mempunyai **tugas** membantu Camat dalam melaksanakan tugas menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekertariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
3. Menerima, meniliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
4. Mengelola urusan rumah tangga, urusan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perlengkapan dan peralatan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1) **Kepala Sub Bagian Umum;**

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan fungsi tersebut sebagaimana dimaksud, kepala sub Bagian Umum menyelenggarakan tugas dan fungsi :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
3. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
4. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan asset;
5. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
6. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
10. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

2) **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan. Kepala sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan tugas dan fungsi :

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran tahunan kecamatan;

c. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;

1. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
2. Mengkoordinasikan evaluasi dan menyusun laporan keuangan pada lingkup kecamatan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan kecamatan;
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup kecamatan;
5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat

3) **Kepala Seksi Tata Pemerintahan;** mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan. Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
3. Menyelenggarakan lomba atau penilaian desa / kelurahan tingkat kecamatan;
4. Menyelenggarakan fasilitasi kerja sama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antara desa/kelurahan;
5. Memfasilitasi penataan desa / kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat

4) **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;** mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat desa..

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa / kelurahan diwilayah kerjanya;
3. Melaksanakan dan menfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
5. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
6. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/kelurahan;
9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat.
10. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa / kelurahan diwilayah kerjanya;
12. Melaksanakan dan menfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
14. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
15. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
16. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
17. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/kelurahan;
18. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

5) **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban. Penjabaran tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud adalah:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi dan kesatuan bangsa serta kemasyarakatan;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
4. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Camat.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Burau dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 2 di bawah ini :

Camat

Sekertaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa

Desa

Desa

Gambar 2

Struktur Organisasi Kecamatan Burau

**2.2. Sumber Daya**

**2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kerja**

Kecamatan Burau adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Burau memiliki luas wilayah 256,23 Km2 atau meliputi 3,69 % dari luas Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tomoni

- Sebelah Selatan : Teluk Bone Sulawesi Tenggara

- Sebelah Barat : Kecamatan Tana Lili Kab. Luwu Utara

- Sebelah Timur : Kecamatan Wotu

**Secara Administrasi** Kecamatan Burau terbagi menjadi 18 (delapan belas) Desa yaitu :

Nama Desa : Luas wilayah :

1. Desa Lauwo 27,22

2. Desa Lagego 7,45

3. Desa Burau 10,04

4. Desa Burau Pantai 8,04

5. Desa Lumbewe 17,55

6. Desa Batu Putih 24,09

7. Desa Cendana 25,09

8. Desa Jalajja 14,61

9. Desa Kalatiri 8,39

10. Desa Mabonta 10,39

11. Desa Lambarese 20,01

12. Desa Benteng 12,23

13. Desa Bone Pute 18,58

14. Desa Lanosi 19,87

15. Desa Lewonu 14,33

16. Desa Asana 7,38

17. Desa Laro 5,96

18. Desa Lambara Harapan 5,00 (Sumber BPS Lutim)

**2.2.2. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 28 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi

sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu, juga dibutuhkan minimal 3 (tiga) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 21 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel di bawah ini :

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Burau sebanyak : 21 orang, yang terdiri dari :

a. Golongan IV : 1 orang

b. Golongan III : 6 orang

c. Golongan II : 13 orang

d. Golongan I : 1 orang

Kondisi Pegawai Kecamatan Burau yang menduduki jabatan struktural adalah :

a. Camat ( Eselon III ) : 1 orang

b. Sekretaris Camat ( Eselon III ) : 1 orang

c. Kepala Seksi ( Eselon IV ) : 1 orang

d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV ) : 2 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Burau berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Strata 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Sarjana Muda/D3 | 1 | - | 1 |
| 3 | SLTA | 9 | 4 | 13 |
| 4 | SLTP | 1 | - | 1 |
| 5 | SD | - | - |  |
| Jumlah | 15 | 5 | 21 |

 *Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Burau*

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Burau tidak sesuai dengan Formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Burau yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang ,dengan latar belakang pendidikan Strata 1 sebanyak 6 orang, sarjana muda 1 orang, SLTA 13 orang dan SLTP 1 orang SD tidak ada.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Burau berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat / Golongan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pangkat/Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Pembina, IV/a | 1 | - | 1 |
| 2 | Penata Tk.I, III/d | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Penata, III/c | - | - | - |
| 4 | Penata Muda Tk.I, III/b | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Penata Muda, III/a | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Pengatur Tk.I,II/d | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Pengatur, II/c | 5 | - | 5 |
| 8 | Pengatur Muda Tk.I,II/b | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Pengatur Muda, II/a | 1 | - | 1 |
| 10 | Juru Tk.I | 1 | - | 1 |
| Jumlah | 15 | 6 | 21 |

 *Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Burau*

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Burau berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat adalah sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.3**

**Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Burau berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pendidikan Diklat | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | PIM II | - | - | - |
| 2 | PIM III | 1 | - | 1 |
| 3 | PIM IV | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Prajabatan | 12 | 4 | 16 |
| Jumlah | 15 | 6 | 21 |

 *Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Burau*

**2.2.3. Sarana dan Prasarana**

Prasarana kantor yang digunakan Kecamatan Burau adalah gedung Kantor berlantai 2 dibangun pada tahun 2013 yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Burau, dimana ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Camat, 1 ruang kerja Sekretaris Camat, 3 ruang kerja Kepala Seksi dan 2 Kasubag, 1 ruang kerja pengelola barang, 1 ruang kerja kolektor, 1 ruang Tim Penggerak PKK Kec. 1 ruang aula Mini dan 1 ruang tempat Sholat . dengan kondisi tempat kerja tersebut cukup memadai.

Permasalahan yang ditemui adalah tidak ada namun diperlukan biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia dapat di lihat dalam tabel di berikut ini :

**Tabel 2.4**

**Asset/ Modal Kecamatan Burau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Tanah | 3.000 | M2 |
| 2 |  Lapangan Bola | 1.000 | M2 |
| 3 | Gedung Kantor | 1 Unit | Baik (dibangun 2013) |
| 4 | Gedung Serbaguna | 1 unit | sudah ada yang rusak |
| 5 | Rumah Jabatan | 1 Unit | baik |
| 6 | Gheus Hause | 1 Unit | baik |
| 7 | Mobil | 2 unit | baik |
| 8 | Sepeda motor | 4 unit | baik |
| 9 | Meja ½ biro | 22 buah | baik |
| 10 | Meja rapat | 5 buah | baik |
| 11 | Meja 1 biro | 10 buah | baik |
| 12 | Kursi putar | 9 buah | sudah ada yang rusak |
| 13 | Kursi lipat  | 250 buah | sudah ada yang rusak |
| 14 | Kursi rapat | 200 buah | baik |
| 15 | Kursi tamu | 5 set | baik |
| 16 | Kursi kerja staf | 22 buah | baik |
| 17 | Lemari kayu | 13 buah | sudah ada yang rusak |
| 18 | Meja komputer | 5 buah | sudah ada yang rusak |
| 19 | Komputer/CPU | 5 unit | baik |
| 20 | Monitor | 5 unit | baik |
| 21 | Printer | 8 unit | sudah ada yang rusak |
| 22 | Meja resepsionis | 1 unit | baik |
| 23 | Laptop | 4 unit | sudah ada yang rusak |
| 24 | Papan pengumuman | 1 buah | baik |
| 25 | Wireless | 1 unit | baik |
| 26 | Kamera digital | 1 buah | baik |
| 27 | Multimedia proyektor | 1 unit | baik |
| 28 | Mesin tik | 2 buah | sudah ada yang rusak |
| 29 | Jaringan Internet | 1 unit | Kurang Bagus |
| 30 | Kipas Angin | 2 Unit | baik |
| 31 | Kulkas | 1 Unit | baik |
| 32 | PDAM | 1 Unit | baik |
| 33 | AC | 14 Unit | baik |
| 34 | Brand Kas | 2 Unit | sudah ada yang rusak |
| 35 | Mesin Babat | 1 unit | baik |

*Sumber : Pengelola Barang Kecamatan Burau*

Prasarana Kantor sebagaimana tersebut di atas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan.

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Burau didasarkan pada target Renstra Kecamatan Burau Tahun 2011 – 2015, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Burau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait

2. Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan

3. Frekuensi pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan

4. Frekuensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5. Pemenuhan permintaan peserta bimtek, diklat dari SKPD lain

6. Persuratan umum yang diterbitkan tepat waktu

7. Persentase surat keterangan HO, IMB dll yang diterbitkan tepat waktu

8. Kehadiran dan usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan

9. Kegiatan TP-PKK dalam meningkatkan pemahaman akan kesetaraan gender dalam pembangunan

10. Penurunan jumlah gangguan kamtibmas

11. Pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah yang difasilitasi

12. Frekuensi pelaksanaan kegiatan kerja bakti/ gotong royong disetiap desa.

13. Besarnya partisipasi masyarakat dalam PNPM

14. Capaian target PBB

15. Capaian target PAD yang menjadi kewenangan kecamatan

16. Frekuensi pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait upaya peningkatan hasil produk pertania.

Kinerja Kecamatan Burau berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Burau 2011-2015 disajikan pada tabel 2.5 berikut ini :

**TABEL 2.5**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BURAU TAHUN 2011 S.D 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke- | Realisasi Capaian Tahun Ke- | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | Ket. |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait (kali) |  | 60 kali | 12kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 2 | Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan (kali) |  | 20 kali | 4kali | 4kali | 4kali | 4 kali | 4kali | 4kali | 2kali | 4 kali | 4kali | 4kali | 100 | 50% | 100% | 100% | 100% |  |
| 3 | Frrekuensi pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa (kali) |  | 10 kali | 2kali | 2kali | 2kali | 2 kali | 2kali | 1 kali | 1 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |  |
| 4 | Frekuensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH) |  | 70 OH | 14OH | 14 OH | 14 OH | 14 OH | 14 OH | 8OH | 14 OH | 14 OH | 14 OH | 20 OH | 57,2% | 100% | 100% | 100% | 142% |  |
| 5 | Pemenuhan permintaan peserta bimtek, diklat dari SKPD lain (orang) |  | 40 org | 8org | 8org | 8org | 8org | 8org | 7 org | 6 org | 6 org | 5 org | 4 org | 87,50% | 75,00% | 75,00% | 62,50% | 50% |  |
| 6 | Persuratan umum yang diterbitkan tepat waktu (surat) |  | 3400 surat | 650 surat | 650 surat | 650 surat | 734 surat | 734 surat | 713 surat | 722 surat | 706 surat | 756 surat | 753surat | 110% | 111% | 109% | 103% | 103% |  |
| 7 | Persentase urat keterangan HO, IMB dll yang diterbitkan tepat waktu |  | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 103% | 103% | 157,59% | 147,29% | 111,75% | 101,29% | 100,82% |  |
| 8 | kehadiran dan usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan (orang) |  | 1000 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 200 org | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 9 | kegiatanTP-PKK dalam meningkatkan pemahaman akan kesetaraan gender dalam pembangunan (kali) |  | 60 kali | 12  kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 12kali | 12 kali | 12 kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 10 | Penurunan jumlah gangguan kamtibmas |  | 34gangg. | 10 gangg. | 8gangg | 7gangg | 5 gangg | 4 gangg | 8gangg. | 7 gangg | 5 gangg | 4gangg | 8gangg | 80% % | 87,50% % | 71,43% % | 80,00% % | 200% % |  |
| 11 | Pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah yang di fasilitasi (pengaduan) |  | 40 pengaduan | 8 pengaduan | 8 pengaduan | 8pengaduan | 8 pengaduan | 8pengaduan | 7pengaduan | 6 pengaduan | 6pengaduan | 5pengaduan | 12Pengaduan | 87,50% | 75,00% | 75,00% | 62,50% | 150% |  |
| 12 | Capaian target PBB (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 13 | Capaian target PAD yang menjadi kewenangan kecamatan (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 110% | 104% | 100% | 100% | 105% | 157,59% | 147,29% | 111,75% | 101,29% | 100,82% |  |
| 14 | Frekuensi pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait upaya peningkatan hasil pertanian |  | 60 kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 12kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Burau sebagaimana tabel 2.5 di atas sebagai berikut :

1. Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan target sebagai berikut :
2. Tahun 2011 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali, pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini 100%
3. Tahun 2012 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini 100%
4. Tahun 2013 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali sama dengan tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya 100%
5. Tahun 2014 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali rapat pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini juga 100%
6. Tahun 2015 ditargetkan 12 kali, direalisasikan 12 kali pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui rapat oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja terkait, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat sehingga capaian pada tahun ini juga 100%.

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian pada indikator kinerja ini dalam 5 (lima) tahun sebanyak 60 kali pelaksanaan rapat koordinasi,sehingga ratio capaian dalam 5 (lima) tahun adalah 100% sehingga diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya guna karena sangat berhasil dalam pencapaiannya.

1. Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan dengan target sebagai berikut :
2. Tahun 2011 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali sehingga rasio capaian indikatornya 100%.
3. Tahun 2012 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 2 kali sehingga rasio capaian indikatornya hanya 50%, Kendalanya adalah minimnya pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Burau sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu terkendala dengan pembentukan Tim menyebabkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan koordinasi, petunjuk dan arahan dari Camat, ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan kedepan antara lain :
* Koordinasi, petunjuk dan arahan
* Menanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap tugas yang dilaksanakan.

3. Tahun 2013 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

4. Tahun 2014 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

5 Tahun 2015 ditargetkan 4 kali, direalisasikan 4 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%, keluaran pada indikator ini berupa:

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa

- Pembinaan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang berdaya guna dan bertanggung jawab.

Dari capaian setiap tahun tersebut frekuensi capaian dalam lima tahun 18 kali pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 90%

c) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali,sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 2 kali, tercapai 2 kali, sehingga rasio capaian pada tahun ini 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut frekuensi capaian dalam lima tahun 8 kali pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

d) Indikator kinerja frekuensi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 8 OH, sehingga rasio capaian 57,2%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 14 OH, sehingga rasio capaian 100%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 14 OH, sehingga rasio capaian 100%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 14 OH, sehingga rasio capaian 100%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 14 OH, direalisasikan 20 OH, sehingga rasio capaian 142%

Dari capaian setiap tahun tersebut frekuensi capaian dalam lima tahun 70 OH pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

e) Indikator kinerja pemenuhan permintaan peserta bimtek, diklat dari SKPD lain dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan 8 orang, tercapai 7 orang, sehingga rasio capaian 87,50%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 8 orang, tercapai 6 orang, sehingga rasio capaian 75,50%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 8 orang, tercapai 6 orang, sehingga rasio capaian 75,50%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 8 orang, tercapai 5 orang, sehingga rasio capaian 62,50%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 8 orang, tercapai 4 orang, sehingga rasio capaian 50,00%

 Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 28 orang, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 70,00%

f) Indikator kinerja persuratan umum yang diterbitkan tepat waktu dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan 650 surat, tercapai 713 surat, sehingga rasio capaian 110%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 650 surat, tercapai 722 surat, sehingga rasio capaian 111%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 650 surat, tercapai 706 surat, sehingga rasio capaian 109%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 734 surat, tercapai 756 surat,sehingga rasio capaian 103%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 730 surat, tercapai 764, sehingga rasio capaian 105%

 Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 3750 surat, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 106%

g) Indikator kinerja persentase surat keterangan HO, IMB dll yang diterbitkan tepat waktu dengan target setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan ,31.500.000 direalisasikan 49.640.500, sehingga rasio capaian 157,59%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 18.000.000, direalisasikan 26.495.047, sehingga rasio capaian 147,29%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 30.000.000, direalisasikan 33.525.500, sehingga rasio capaian 111,75%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 35.000.000, direalisasikan 35.453.143, sehingga rasio capaian 101,29%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 40.000.000, direalisasikan 40.326.496, sehingga rasio capaian 100,82%

 Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 185.440.676, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 120,02%

h) Indikator kinerja kehadiran dan usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan dengan target setiap tahunnya sebagai berikut:

 1. Tahun 2011 ditargetkan 200 orang, direalisasikan 200 orang, sehingga rasio capaian 100%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 200 orang, direalisasikan 200 orang, sehingga rasio capaian 100%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 200 orang, direalisasikan 200orang, sehingga rasio capaian 100%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 200 orang, direalisasikan 200 orang, sehingga rasio capaian 100%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 200 orang, direalisasikan 200 orang, sehingga rasio capaian 100%

 Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 1000 orang, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

1. Indikator kinerja kegiatan TP-PKK dalam meningkatkan pemahaman akan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan target sebagai berikut :
2. Tahun 2011 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
3. Tahun 2012 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
4. Tahun 2013 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
5. Tahun 2014 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%
6. Tahun 2015 ditargetkan 12 kali, tercapai 12 kali, sehingga rasio capaian 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 60 kali, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

j) Indikator kinerja penurunan jumlah gangguan kamtibmas, dengan target setiap tahun sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 10 gangguan, tercapai 8 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 80%

 2. Tahun 2012 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 8 gangguan, tercapai 7 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 87,50%

 3. Tahun 2013 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 7 gangguan, tercapai 5 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 71,43%

 4. Tahun 2014 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 5 gangguan, tercapai 4 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 80%

 5. Tahun 2015 ditargetkan penurunan jumlah gangguan kamtibmas 4 gangguan, tercapai 8 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian 200%

 Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 32 penurunan jumlah gangguan, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 94,12%

k) Indikator kinerja pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah yang difasilitasi dengan target setiap tahun sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 7 pengaduan, sehingga rasio capaian 87,50%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 6 pengaduan, sehingga rasio capaian 75.00%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 6 pengaduan, sehingga rasio capaian 75,00%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 5 pengaduan, sehingga rasio capaian 62,50%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 8 pengaduan, direalisasikan 12 pengaduan, sehingga rasio capaian 150%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian dalam lima tahun 36 pengaduan yang telah difasilitasi, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 90%

l) Indikator kinerja capaian target PBB dengan target setiap tahunnya sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan Rp. 332.883.860 tercapai 100%, sehingga rasio capaian 100%

 2. Tahun 2012 ditargetkan Rp. 334.842.920 tercapai 100%, sehingga rasio capaian 100%

 3. Tahun 2013 ditargetkan Rp. 335.804.275, tercapai 100%, sehingga rasio capaian 100%

 4. Tahun 2014 ditargetkan Rp. 345.276.541, tercapai 100%, sehingga rasio capaian 100%

 5. Tahun 2015 ditargetkan Rp. 366.968.700 tercapai 100%, sehingga rasio capaian 100%

 Dari capaian setiap tahun diperoleh capaian dalam lima tahun 100%, sehingga rasio capaian dalam lima tahun adalah 100%

n) Indikator kinerja capaian target PAD yang menjadi kewenangan kecamatan dengan target setiap tahun sebagai berikut :

 1. Tahun 2011 ditargetkan 31.500.000, tercapai 49.640.500, sehingga rasio capaian 157.59%

 2. Tahun 2012 ditargetkan 18.000.000, tercapai 26.495.047 147 sehingga rasio capaian 147,19%

 3. Tahun 2013 ditargetkan 30.000.000 tercapai 33.525.500, sehingga rasio capaian 111,75%

 4. Tahun 2014 ditargetkan 35.000.000, tercapai 35.453.143, sehingga rasio capaian 101,29%

 5. Tahun 2015 ditargetkan 40.000.000, tercapai 40.326.486, sehingga rasio capaian 100,82%

 Dari capaian setiap tahun diperoleh capaian dalam lima tahun 154.500.000, sehingga rasio capaian 185.440.676 dalam lima tahun adalah 120,02%

**TABEL 2.6**

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BURAU**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran tahun ke - | Realisasi Anggaran tahun ke - | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke - | Rata-rata pertumbuhan |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja Daerah | 1.956.421.411 | 2.040.388.972 | 2.139.125.592 | 2.697.102.811 | 2.548.746.373 | 1.833.199.294 | 1.952.907.159 | 2.110.167.654 | 2.657.167.081 | 2.445.427.672 | 94 | 96 | 99 | 99 | 96 | 1.848.531.913 | 2.199.773.772 |
| Belanja Tidak langsung | 1.242.591.911 | 1.343.901.752 | 1.555.113.392 | 1.719.407.811 | 1.790.163.573 | 1.193.390.121 | 1.277.864.717 | 1.539.935.619 | 1.708.648.992 | 1.701.850.473 | 99 | 95 | 99 | 99 | 95 | 1.530.235.687 | 1.484.337.499 |
| Belanja Langsung |  713.829.500 |  696.487.220 |  584.012.200 |  977.695.000 |  758.582.800 |  639.809.149 |  675.042.442 |  570.232.035 |  948.518.089 |  743.577.199 | 90 | 97 | 98 | 97 | 96 |  746.121.344 |  715.435.782 |
| Belanja barang dan Jasa |  496.729.500 |  551.488.220 |  452.512.200 |  649.784.600 |  713.982.800 |  452.126.673 |  531.412.442 |  444.032.035 |  626.807.689 |  699.727.199 | 91 | 96 | 98 | 96 | 98 |  482.397.024 |  550.821.207 |
| Belanja Modal |  133.100.000 |  60.999.000 |  67.500.000 |  327.901.400 |  44.600.000 |  103.682.500 |  59.630.000 |  66.200.000 |  321.710.400 |  43.850.000 | 78 | 98 | 98 | 98 | 98 |  126.820.080 |  119.014580 |

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Burau tahun anggaran 2011-2015.

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Burau**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Burau sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja sebagai berikut :

1). Tantangan

1. Masih belum optimalnya mutu pelayanan publik di Kecamatan Burau
2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di Kecamatan Burau
3. Lemahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kecamatan Burau
4. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur yang berkualitas dan professional
5. Mobiltas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan
6. Masih terjadinya pelanggaran mendirikan bangunan
7. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2) Peluang

 a) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

 b) Letak strategis Kecamatan Burau yang berbatasan dengan empat Kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Angkona

 c) Ketersediaan infrastruktur jalan akses keluar masuk wilayah Kecamatan Burau

 d) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan yang semuanya merupakan perangkat Desa

 e) Tingginya tingkat partisipatif publik terhadap jalannya proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan baik berupa dukungan maupun masukan-masukan yang sangat kritis

 f) Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik mempengaruhi situasi yang kondusif

 g) Peningkatan tekhnologi informasi memungkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.

**Tabel 2.7**

**Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/Kegiatan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Anggaran(Rp.Ribu) | Anggaran(Rp.Ribu) | Anggaran(Rp.Ribu) | Anggaran(Rp.Ribu) | Anggaran(Rp.Ribu) |
| 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 444.781.000 | 530.266.250 | 362.757.800 | 440.823.400 | 479.564.900 |
|  |  | Realisasi | 413.598.365 | 518.585.559 | 345.293.270 | 437.150.101 | 467.355.868 |
|  |  | % | 93% | 87% | 92% | 99% | 98% |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 136.275.000 | 100.635.000 | 125.150.000 | 205.950.000 | 161.594.000 |
|  |  | Realisasi | 128.714.380 | 98.444.000 | 114.555.200 | 201.095.700 | 153.746.910 |
|  |  | % | 95% | 98% | 92% | 98% | 95% |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 15.000.000 | - | - | - | - |
|  |  | Realisasi | 15.000.000 | - | - | - | - |
|  |  | % | 100% | - | - | - | - |
| 4 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 16.000.000 | 35.590.000 | 25.755.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
|  |  | Realisasi | 13.631.500 | 27.202.500 | 12.145.000 | 3.835.000 | 16.131.700 |
|  |  | % | 86% | 76% | 47% | 19% | 65% |
| 5 | Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 37.141.000 | 36.936.000 | 45.636.000 | 57.566.000 | 36.900.000 |
|  |  | Realisasi | 36.642.200 | 35.578.000 | 44.734.000 | 51.547.000 | 36.850.000 |
|  |  | % | 99% | 96% | 98% | 90% | 100% |
| 6 | Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 19.683.800 | 24.470.000 | 37.670.000 | 43.000.000 | 51.600.000 |
|  |  | Realisasi | 19.631.500 | 24.361.500 | 31.849.000 | 40.979.500 | 51.018.500 |
|  |  | % | 100% | 100% | 85% | 95% | 100% |
| 7 | Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 2.500.000 | 5.118.000 | 8.118.000 | 8.638.000 | 8.638.000 |
|  |  | Realisasi | 1.864.000 | 3.106.000 | 7.630.000 | 8.315.000 | 7.876.000 |
|  |  | % | 75% | 61% | 94% | 96% | 91% |
| 8 | Program perencanaan pembangunan daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran | 3.692.450 | 4.132.000 | 7.493.000 | 10.063.000 | 37.079.000 |
|  |  | Realisasi | 3.679.500 | 3.637.000 | 6.815.000 | 8.904.000 | 33.654.000 |
|  |  | % | 100% | 88% | 91% | 88% | 91% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan data tabel 2.7, dapat diuraikan di bawah ini :

Tahun 2011

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana Rp.18.650.000,- dan terealisasi Rp. 15.688.265,- dengan keluaran tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan hasilnya adalah terwujudnya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana Rp. 6.000.000,- dan terealisasi Rp. 5.700.000,- dengan keluaran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan hasilnya adalah terwujudnya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi dana Rp. 1.800.000,- dan terealisasi Rp. 1.800.000,- dengan keluaran tersedianya materai untuk administrasi keuangan dan hasilnya terlaksananya administrasi keuangan yang optimal
5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana Rp. 28.822.000,- dan terealisasi Rp. 28.798.500,- dengan keluaran tersedianya peralatan dan bahan kebersihan dan hasilnya adalah lingkungan kantor menjadi bersih dan nyaman
6. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi dana Rp. 4.650.000,- dan terealisasi Rp. 3.563.500,- dengan keluaran adanya perbaikan peralatan kerja dan meubelair kantor dan hasilnya adalah terwujudnya pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana Rp. 2.974.000,- dan terealisasi Rp. 2.968.500,- dengan keluaran tersedianya alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor dan hasilnya adalah terwujudnya penerangan bangunan kantor
8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan aloaksi dana Rp. 66.900.000,- dan terealisasi Rp. 41.413.000,- dengan keluaran tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 4.740.000,- dan terealisasi Rp. 4.519.000,- dengan keluaran adanya bahan bacaan peraturan dan perundang-undangan dan hasilnya adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
10. Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi dana Rp. 54.615.000,- dan terealisasi Rp. 53.911.500,- dengan keluaran tersedianya aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan hasilnya adalah terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis dengan alokasi dana Rp. 42.000.000,- dan terealisasi Rp. 42.000.000,- dengan keluaran tersedianya tenaga pendukung administrasi/tekhnis dan hasilnya adalah terwujudnya pelayanan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis
12. Kegiatan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dengan alokasi dana Rp. 213.630.000,- dengan terealisasi Rp. 213.236.100 dengan keluaran tersedianya penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dan hasilnya adalah terwujudnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan SKPD yang optimal
13. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor dengan kegiatan sebagai berikut :
14. Kegiatan penyediaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan aloaksi dana Rp. 12.630.000,- dan terealisasi Rp. 12.485.700,- dengan keluaran tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas dan hasilnya adalah terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas yang siap pakai
15. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan alokasi dana Rp. 5.060.000,- dan terealisasi Rp. 5.020.000,- dengan keluaran tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas dan hasilnya adalah terpeliharanya rumah jabatan/dinas dengan baik
16. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana Rp. 10.000.000,- dan terealisasi Rp. 9.880.500,- dengan keluaran tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan hasilnya adalah terpeliharanya tempat kerja dengan baik
17. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dengan alokasi dana Rp. 27.000.000,- dan terealisasi Rp. 23.739.680,- dengan keluaran tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan hasilnya adalah terpeliharanya kendaraann dinas dengan baik
18. Pembangunan gedung kantor E-KTP dengan alokasi dana Rp. 80.000.000,- dan terealisasi Rp. 76.172.500,- dengan keluaran tersedianya ruangan untuk pembuatan E-KTP pada Kantor Camat Burau dan hasilnya adalah terlaksananya pembangunan gedung/ruangan E-KTP
19. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair dengan alokasi dana Rp. 1.585.000,- dan terealisasi Rp. 1.416.000,- dengan keluaran tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubelair dan hasilnya adalah meubelair kantor selalu terpelihara dengan baik
20. Program peningkatan disipin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
21. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi dana Rp. 7.800.000,-dan terealisasi Rp. 7.800.000,- dengan keluaran tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur dan hasilnya adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi pegawai dan hasilnya adalah
22. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan alokasi dana Rp. 7.200.000,- dan terealisasi Rp. 7.200.000,- dengan keluaran tersedianya pakaian khusus bagi pegawai dan hasilnya adalah terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 16.000.000,- dan terealisasi Rp. 13.685.700,- dengan keluaran terlaksananya bimbingan tekhnis dan hasilnya adalah terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu

5) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan rapat koordinasi Unsur MUSPIKA dan monitoring, evaluasi pemerintahan desa dengan alokasi dana Rp. 37.141.000,- dan terealisasi Rp. 36.642.200,- dengan target dan sasaran kinerja tercapai 100% dan hasilnya adalah :

 a) Rapat koordinasi Unsur Muspika dapat dilaksanakan

 b) Monitoring dan evaluasi melalui pembinaan administrasi pemerintahan desa dapat dilaksanakan

6) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan peningkatan peran ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana Rp. 19.683.800,- dan terealisasi Rp. 19.631.500,- dengan target dan sasaran kinerja tercapai 100% dan hasilnya adalah kegiatan PKK dalam peningkatan peran ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dapat dilaksanakan.

7) Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dengan alokasi dana Rp. 2.500.000,- dan terealisasi Rp. 1.864.000,- dengan target dan sasaran kinerja tercapai 50% dan hasilnya adalah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dapat dilaksanakan meskipun dari target dua kali terlaksana hanya satu kali

8) Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan alokasi dana Rp. 3.692.450,- dan terealisasi Rp. 3.679.500,- dengan target dan sasaran kinerja tercapai 135% dan hasilnya adalah terlaksananya kegiatan musrenbang.

Tahun 2012

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan yaitu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pendukung administrasi/ tekhnis dan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dengan alokasi dana keseluruhan Rp. 530.266.250,- terserap Rp. 518.585.559,- (99%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut dihasilkan :
2. Tertib administrasi surat menyurat
3. Kantor yang bersih dan representatif
4. Kelancaran operasional kantor
5. Tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy
6. Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor
7. Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, pemeliharaan rutin/berkala meubelair dengan alokasi dana Rp. 205.950.000,- terserap Rp. 201.095.700,- (98%), target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut di atas dihasilkan antara lain :
9. Terpeliharanya rumah jabatan/dinas dengan baik
10. Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
11. Kendaraan dinas dapat digunakan dengan baik
12. Terwujudnya sarana kantor yang siap pakai
13. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 20.000.000,- terserap Rp. 3.835.000,- (19%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan : sumber daya aparatur yang berkualitas
14. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui kegiatan 2 (dua) kegiatan yaitu rapat koordinasi unsur muspika dan monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa dengan alokasi dana Rp. 36.936.000,- terserap Rp. 35.578.000,- (96%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 75% dari program tesebut dihasilkan pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintah desa.
15. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu peningkatan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana Rp. 24.470.000,- terserap Rp. 24.361.500,- (100%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan pelaksanaan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
16. Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa dengan alokasi dana Rp. 5.118.000,- terserap Rp. 3.106.000,- (61%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 50% karena pelaksanaannya ditargetkan 2 (dua) kali namun terlaksana hanya 1 (satu) kali.
17. Program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan alokasi dana Rp. 4.132.000,- terserap Rp. 3.637.000,- (88%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 109% dari program tersebut dihasilkan tingkat partisipatif masyarakat dalam mengusulkan kegiatan pembangunan banyak terserap.

Tahun 2013

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pendukung administrasi/ tekhnis dan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dengan alokasi dana keseluruhan Rp. 362.757.800,- terserap Rp. 345.293.270,- (92%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut dihasilkan tertib administrasi surat menyurat, kantor yang bersih dan representatif, tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy, terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor, terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, pemeliharaan rutin/berkala meubelair dengan alokasi dana Rp. 125.150.000,- terserap Rp. 114.555.200,- (92%), target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut di atas dihasilkan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik dan siap pakai
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 25.755.000,- terserap Rp. 12.145.000,- (47%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan : sumber daya aparatur yang berkualitas
4. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu rapat koordinasi unsur muspika dan monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa dengan alokasi dana Rp. 45.636.000,- terserap Rp. 44.734.000,- (98%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tesebut dihasilkan pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintah desa.
5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu peningkatan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana Rp. 37.670.000,- terserap Rp. 31.849.000,- (85%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan pelaksanaan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
6. Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa dengan alokasi dana Rp. 8.118.000,- terserap Rp. 7.630.000,- (94%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% karena pelaksanaannya ditargetkan 2 (dua) kali dan terlaksana 2 (dua) kali.
7. Program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan alokasi dana Rp. 7.493.000,- terserap Rp. 6.815.000,- (91%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 73% dari program tersebut dihasilkan tingkat partisipatif masyarakat dalam mengusulkan kegiatan pembangunan terserap.

Tahun 2014

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pendukung administrasi/ tekhnis dan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dengan alokasi dana keseluruhan Rp. 440.823.400,- terserap Rp. 437.150.101,- (99%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut dihasilkan tertib administrasi surat menyurat, kantor yang bersih dan representatif, tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy, terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor, terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, pemeliharaan rutin/berkala meubelair dengan alokasi dana Rp. 205.950.000,- terserap Rp. 201.095.700,- (98%), target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut di atas dihasilkan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik dan siap pakai
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 20.000.000,- terserap Rp. 3.835.000,- (19%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan : sumber daya aparatur yang berkualitas
4. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu rapat koordinasi unsur muspika dan monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa dengan alokasi dana Rp. 57.566.000,- terserap Rp. 51.547.000,- (90%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tesebut dihasilkan pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintah desa.
5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu peningkatan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana Rp. 43.000.000,- terserap Rp. 40.979.500,- (95%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan pelaksanaan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
6. Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa dengan alokasi dana Rp. 8.638.000,- terserap Rp. 8.315.000,- (96%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% karena pelaksanaannya ditargetkan 2 (dua) kali dan terlaksana 2 (dua) kali yang menghasilkan peraturan desa tentang APBDesa pada 16 Desa.
7. Program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan alokasi dana Rp. 10.063.000,- terserap Rp. 8.904.000,- (89%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 79% dari program tersebut dihasilkan tingkat partisipatif masyarakat dalam mengusulkan kegiatan pembangunan terserap.

Tahun 2015

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pendukung administrasi/ tekhnis dan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dengan alokasi dana keseluruhan Rp. 479.564.900,- terserap Rp. 467.355.868,- (98%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut dihasilkan tertib administrasi surat menyurat, kantor yang bersih dan representatif, tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy, terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan bangunan kantor, terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dengan alokasi dana Rp. 161.594.000,- terserap Rp. 153.746.910,- (95%), target dan sasaran kinerja kegiatan ini masing-masing tercapai 100%, dari program tersebut di atas dihasilkan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik dan siap pakai
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 25.000.000,- terserap Rp. 16.131.700,- (65%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan : sumber daya aparatur yang berkualitas
4. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu rapat koordinasi unsur muspika dengan alokasi dana Rp. 36.900.000,- terserap Rp. 36.850.000,- (100%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tesebut dihasilkan pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan dalam mendukung akselerasi pembangunan.
5. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu peningkatan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana Rp. 51.600.000,- terserap Rp. 51.018.500,- (99%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% dari program tersebut dihasilkan pelaksanaan kegiatan TP-PKK dalam mendukung peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
6. Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa dengan alokasi dana Rp. 8.638.000,- terserap Rp. 7.876.000,- (91%) target dan sasaran kinerja kegiatan ini tercapai 100% karena pelaksanaannya ditargetkan 2 (dua) kali dan terlaksana 2 (dua) kali yang menghasilkan peraturan desa tentang APBDesa sebanyak 16 Desa.
7. Program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dan monitoring, evaluasi dan pealporan dengan alokasi dana Rp. 37.079.000,- terserap Rp. 33.654.000,- (90%) target dan sasaran dari 2 (dua) kegiatan ini tercapai 97% dari program tersebut dihasilkan tingkat partisipatif masyarakat dalam mengusulkan kegiatan pembangunan terserap dengan baik dan pembinaan administrasi pemerintah desa menjadi lebih baik.

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Burau**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Burau sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja sebagai berikut :

1). Tantangan

1. Masih belum optimalnya mutu pelayanan publik di Kecamatan Burau
2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di Kecamatan Burau
3. Lemahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kecamatan Burau
4. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur yang berkualitas dan professional
5. Mobiltas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam administrasi kependudukan
6. Masih terjadinya pelanggaran mendirikan bangunan
7. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2) Peluang

 a) Tersedianya jumlah pegawai yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

 b) Letak strategis Kecamatan Burau yang berbatasan dengan empat Kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Tomoni, kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Angkona

 c) Ketersediaan infrastruktur jalan akses keluar masuk wilayah Kecamatan Burau

 d) Status kelembagaan organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan yang semuanya merupakan perangkat Desa

 e) Tingginya tingkat partisipatif publik terhadap jalannya proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan baik berupa dukungan maupun masukan-masukan yang sangat kritis

 f) Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik mempengaruhi situasi yang kondusif

 g) Peningkatan tekhnologi informasi memungkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.